

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TMUR KEPADA PERUSAHAAN TERKAIT
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAS KESEHATAN
KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



OLEH :

HERMAYA SEPTI MAHARANI
NPM: 16300095

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PERUSAHAAN
TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAS
KESEHATAN KERJA PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

HERMAYA SEPTI MAHARANI

NPM: 16300095

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PERUSAHAAN
TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP HAK
PEKERJA ATAS KESEHATAN KERJA PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



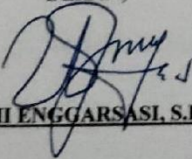
OLEH :

HERMAYA SEPTI MAHARANI
NPM: 16300095

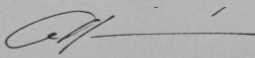
SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING


SETO CAHYONO, S.H., M.H.

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PERUSAHAAN
TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAS
KESEHATAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

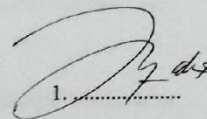
OLEH:

HERMAYA SEPTI MAHARANI
NPM: 16300095

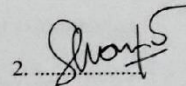
TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

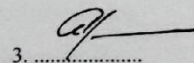
1. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (KETUA)**


1.

2. **SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)**


2.

3. **SETO CAHYONO, S.H., M.H. (ANGGOTA)**


3.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada Perusahaan Terkait Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Atas Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Ummi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. dr. Ratna Winahyu L.D., SH.,M.Hum selaku Dosen Wali yang selama ini telah membantu dalam urusan akademik dari awal kuliah hingga saat ini.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing

dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah dan Ibu tercinta, serta adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
8. Dimas Prabu Anggabaya yang telah memberi dorongan dan semangat serta membantu finansial selama masa perkuliahan dan membantu bertukar pikiran dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas E angkatan 2016 Fakultas Hukum, atas dukungan dan kerja samanya.
10. Lisca Dwi Utami, S.H., dan Noviani Dwi S, S.H., yang telah membantu saya dalam hal-hal yang belum saya mengerti untuk mengerjakan skripsi.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Hermaya Septi Maharani

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hermaya Septi Maharani
NPM : 16300095
Alamat : Kemlaten VI No. 20, RT.01 RW. 05, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya
No. Telp (HP) : 0838-3242-2330

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada Perusahaan Terkait Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Atas Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,

1000
METERAL
TEMPEL
0946AJX764956531

(Hermaya Septi Maharani)
NPM: 16300095

ABSTRACT

The study, entitled Supervision of the East Java Provincial Government to Companies in Providing Protection of Workers' Rights to Occupational Health During the Covid-19 Pandemic, aims first to find out what forms of supervision the Regional Government of East Java Province takes in supervising companies in the regions of Java Province. Timur related to the occupational health of its workers. Second, to find out the guarantee of occupational health protection for workers in the company and to know the supervisory mechanism carried out by the company to assist labor inspectors in carrying out their supervisory functions.

The research method used in this thesis is using the normative juridical research method which is library research, namely research on legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of the study's first conclusion: that the form of supervision of the Regional Government of East Java Province to companies to ensure the fulfillment of workers' rights to occupational health during the Covid-19 pandemic is a form of preventive supervision (prevention efforts) and a form of repressive supervision (giving sanctions). Those who carry out labor inspection activities are the Governor together with the Regent and/or Mayor with the assistance of the Civil Service Police Unit, the Covid-19 Prevention Task Force and the TNI and POLRI. To ensure the fulfillment of workers' rights to occupational health, the Regional Government of East Java Province must carry out supervision by ensuring that every company can guarantee the health of its workers and provide reports to the labor inspector and the company in charge of carrying out health checks on workers. it can be proven by every company implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) which is regulated in Government Regulation Number 50 of 2012. Second conclusion: the labor inspection mechanism is carried out the same as the mechanism before the Covid-19 outbreak. Because the existing mechanism is a mechanism with a complete system so that supervision can take place effectively and efficiently. The difference is that during this pandemic, surveillance activities can be carried out online.

Keywords: *Supervision, Occupational Health, Labor, Local Government.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada Perusahaan Terkait Perlindungan Terhadap Hak Pekerja atas Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19, bertujuan pertama untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan di daerah-daerah Provinsi Jawa Timur terkait kesehatan kerja para pekerjanya. Kedua, untuk mengetahui jaminan perlindungan kesehatan kerja para tenaga kerja di perusahaan dan mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan guna membantu pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: bahwa bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja atas kesehatan kerja di masa pandemi Covid-19 ini adalah Bentuk Pengawasan *Preventif* (upaya pencegahan) dan Bentuk Pengawasan *Represif* (pemberian sanksi). Yang melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan adalah Gubernur bersama dengan Bupati dan/atau Wali Kota dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 serta TNI dan POLRI. Untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja atas kesehatan kerja, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus melakukan pengawasan dengan memastikan bahwa setiap perusahaan dapat menjamin atas kesehatan para pekerjanya dan memberikan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan dan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja adalah perusahaan, hal ini dapat dibuktikan dengan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kedua: mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sama seperti mekanisme sebelum adanya wabah Covid-19. Karena mekanisme yang ada merupakan mekanisme dengan sistem yang utuh sehingga pengawasan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang membedakan adalah di masa pandemi ini kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara daring.

Kata Kunci: Pengawasan, Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	24
BAB II BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP HAK PEKERJA ATAS KESEHATAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19.....	26
A. Tugas dan Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan.....	26
B. Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap Hak Pekerja atas Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19.....	31
BAB III MEKANISME PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PERLINDUNGAN	

HAK PEKERJA ATAS KESEHATAN KERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN GUNA MEMBANTU PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	49
A. Pengawasan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19.....	49
B. Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19.....	53
C. Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan.....	63
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	71